

PERAN SISTEM INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKURASI PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP BERDASARKAN SAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

¹Dinda Ayu Wardani, ²Nadiah Hafiz, ³Nanda Syafitri, ⁴Sri Wulan Dari,

⁵Paskalis Putra J Daeli, ⁶Yohanes Agung Nugroho

¹⁻⁶Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika

63230040@bsi.ac.id¹, 63230587@bsi.ac.id², 63230681@bsi.ac.id³,
63230993@bsi.ac.id⁴, 63230710@bsi.ac.id⁵, yohanes.yaq@bsi.ac.id⁶

ABSTRACT

Aset tetap Pemerintah Kota Tangerang bukan sekadar barisan angka di atas kertas, melainkan wujud nyata pelayanan publik yang dibiayai oleh uang rakyat mulai dari gedung sekolah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur jalan. Melalui penguatan sistem informasi aset dan kepatuhan pengungkapan pada CaLK sesuai PSAP 07, penelitian ini berdampak langsung pada minimalisasi risiko pemborosan anggaran akibat data yang tidak sinkron, sekaligus mengamankan opini audit WTP yang krusial bagi iklim pembangunan kota. Pada akhirnya, transparansi dan akurasi tata kelola aset yang direkomendasikan studi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik (*public trust*), memastikan bahwa setiap jengkal aset daerah benar-benar hadir, terawat, dan memberikan manfaat maksimal demi kesejahteraan harian masyarakat Kota Tangerang.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Aset, PSAP 07, Aset Tetap, Kota Tangerang, Akurasi Laporan Keuangan.*

PENDAHULUAN

Akselerasi digitalisasi ini bukan sekadar pembaruan sistem administrasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang menjelma menjadi aset daerah mulai dari puskesmas, gedung sekolah, hingga infrastruktur jalan benar-benar terjaga, berfungsi, dan memberikan manfaat maksimal. Ketika sistem informasi aset mampu menyajikan data yang akurat dan sinkron, pemerintah tidak hanya berhasil mengamankan opini audit terbaik dari BPK, tetapi juga berhasil menutup celah pemborosan anggaran akibat hilangnya pelacakan aset fisik atau pengadaan barang yang tumpang tindih. Pada akhirnya, digitalisasi tata kelola aset ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat (*public trust*), membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen penuh mengelola kekayaan daerah secara

bertanggung jawab demi kesejahteraan warganya.(Khafiyya et al., 2016)

Alokasi anggaran khusus untuk pengolahan dan pemeliharaan basis data ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar wacana publik, melainkan komitmen finansial yang berdampak langsung pada efisiensi layanan harian warga. Ketika basis data pendapatan dan aset terintegrasi dengan valid, Pemerintah Kota Tangerang dapat memangkas birokrasi yang berbelit, mempercepat waktu pelayanan publik, dan mencegah kebocoran anggaran daerah akibat data yang tumpang tindih. Pada tingkat yang lebih luas, transparansi anggaran yang ditopang oleh teknologi ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa setiap dana pajak yang mereka setorkan dikelola dengan akurat, aman, dan dialokasikan secara tepat sasaran untuk membiayai fasilitas publik yang menunjang kesejahteraan mereka.(Laporan

Keuangan Dinas Ketenagakerjaan, 2024)

Kepatuhan mutlak terhadap tahapan pengakuan, pengukuran, hingga pengungkapan aset ini pada akhirnya menentukan seberapa adil dan efektif pelayanan pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat di ruang publik. Ketika regulasi akuntansi seperti PSAP 07 ditegakkan secara presisi di setiap instansi, pemerintah tidak hanya sedang menyusun laporan yang rapi untuk auditor, melainkan sedang membangun benteng perlindungan terhadap hak kekayaan warga kota agar tidak ada aset daerah yang hilang, terbengkalai, atau disalahgunakan. Kejelasan nilai dan keberadaan fisik aset ini memastikan bahwa setiap fasilitas publik baik ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, hingga pusat layanan ketenagakerjaan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan harian warga, dan menjadi bukti sah bahwa tata kelola birokrasi Kota Tangerang benar-benar bekerja untuk memuliakan hajat hidup masyarakatnya. (Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah et al., 2026)

Kesenjangan data ini membawa dampak sosial yang krusial, karena kesalahan pencatatan mutasi bukan sekadar persoalan angka di atas kertas, melainkan risiko lumpuhnya fasilitas publik yang sangat dibutuhkan warga secara mendadak. Ketika kepala daerah terhambat dalam mengambil kebijakan strategis akibat laporan yang tidak akurat, masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya mulai dari penundaan perbaikan jalan yang rusak, keterlambatan renovasi gedung sekolah yang hampir roboh, hingga alokasi fasilitas kesehatan yang tidak tepat sasaran karena kondisi riil di lapangan berbeda dengan apa yang tertera di sistem. Oleh karena itu, menjembatani gap teknologi dan meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset ini berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan hidup harian warga, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh

pemimpin daerah benar-benar berpijak pada realitas kebutuhan masyarakat Kota Tangerang secara cepat dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, signifikansi penelitian ini tidak berhenti sebagai pemenuhan standar akademis atau pemecahan masalah teknis birokrasi semata, melainkan sebagai ikhtiar nyata untuk mengembalikan esensi akuntansi pemerintahan kepada pemilik sahnya, yaitu masyarakat Kota Tangerang. Melalui solusi konkret yang ditawarkan bagi setiap OPD untuk menjembatani kendala inventarisasi hingga pelaporan, studi ini berdampak langsung pada jaminan bahwa anggaran publik tidak akan menguap dalam bentuk aset-aset yang hilang secara administratif atau telantar secara fisik. Dengan terjaganya mutu akuntabilitas keuangan daerah, kepercayaan masyarakat (*public trust*) akan menguat karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa setiap fasilitas kota yang menopang kehidupan sehari-hari mereka dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi keberlanjutan pembangunan daerah. (Pongsibidang & Nugroho, 2023) Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas siklus penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dari proses pengadaan hingga mekanisme penghapusan setelah diterapkannya aplikasi sistem informasi aset saat ini?
2. Sejauh mana sistem informasi aset yang terotomatisasi mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, terutama dalam hal standardisasi nilai kapitalisasi dan pembebanan penyusutan yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Walikota terbaru?
3. Faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi penghambat optimalisasi tata kelola aset, khususnya jika ditinjau dari aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM) teknis,

integrasi data lintas unit kerja, serta keandalan basis data aset sebagaimana yang terindikasi dalam temuan pelaporan keuangan?

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji efektivitas siklus penatausahaan aset tetap berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, mencakup seluruh tahapan dari proses pengadaan hingga mekanisme penghapusan melalui aplikasi sistem informasi aset yang diimplementasikan.
2. Menilai kepatuhan fungsi otomatisasi sistem informasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terutama dalam menjamin ketepatan standardisasi nilai kapitalisasi serta formula penyusutan yang mengacu pada Peraturan Walikota terbaru.
3. Memetakan berbagai kendala dalam tata kelola aset tetap yang bersumber dari kapasitas sumber daya manusia (SDM) teknis, integrasi data lintas unit kerja, serta keandalan basis data demi merumuskan solusi strategis atas temuan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai analisis "Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Akurasi Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan SAP pada Pemerintah Kota Tangerang" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam memperluas cakrawala ilmu pengetahuan maupun sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Secara akademis, studi ini bermanfaat untuk memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya yang mengkaji sinergi antara implementasi teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat

memperdalam analisis mengenai bagaimana digitalisasi mendukung ketepatan pengakuan, kapitalisasi nilai atau pengukuran, hingga teknis penyajian aset tetap yang selaras dengan ketentuan PSAP 07.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi aset, menekan risiko kekeliruan administratif, serta memperkuat validitas laporan keuangan daerah. Bagi instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Ketenagakerjaan, studi ini mengidentifikasi rekomendasi konkret guna mengatasi kendala teknis terkait integrasi basis data serta proses validasi fisik aset yang kerap ditemui di lapangan. Selain itu, bagi para pengelola barang, penelitian ini berfungsi sebagai referensi mengenai urgensi akurasi input data pada aplikasi digital untuk menjamin transparansi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang pada akhirnya mendukung pencapaian kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penerapan metode deskriptif kualitatif untuk membedah keselarasan sistem informasi dengan regulasi akuntansi ini memiliki dampak nyata sebagai instrumen "audit sosial" yang melindungi hak-hak publik atas kekayaan daerah mereka. Dengan menguji secara mendalam setiap tahapan dari pengakuan hingga pengungkapan aset di Pemerintah Kota Tangerang, penelitian ini secara objektif mendeteksi celah-celah kerentanan sistem sebelum celah tersebut berdampak buruk pada pelayanan masyarakat seperti kesalahan pencatatan fasilitas publik yang bisa memicu sengketa lahan atau salah urus aset operasional. Pada akhirnya,

komitmen ilmiah dalam menyelaraskan data sistem dengan standar baku ini berdampak langsung pada penguatan fondasi birokrasi yang sehat, memastikan bahwa sistem digital yang dibangun dengan biaya besar benar-benar berfungsi sebagai pelindung transparansi yang menjamin seluruh aset daerah tetap aman, legal, dan sepenuhnya siap digunakan untuk melayani kebutuhan harian warga Kota Tangerang. (Ekonomi et al., 2025)

Pemanfaatan data sekunder formal seperti Laporan Keuangan Audited 2024, CaLK, dan Peraturan Walikota ini bukan sekadar pengumpulan berkas hukum, melainkan upaya mendasar untuk menguji janji akuntabilitas pemerintah daerah secara objektif di hadapan masyarakat. Dengan membedah dokumen resmi yang menjadi dasar pertanggungjawaban publik ini, penelitian memberikan kepastian kepada warga Kota Tangerang bahwa evaluasi yang dilakukan berbasis pada fakta hukum yang valid, bukan sekadar asumsi. Pada akhirnya, instrumen evaluasi yang menyandingkan data riil daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini berdampak nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan, meminimalkan risiko manipulasi informasi keuangan, serta memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh pejabat daerah benar-benar mencerminkan perlindungan yang aman atas seluruh aset publik yang hak pemanfaatannya ada di tangan warga kota.

Penggunaan metode analisis konten dan studi komparatif tanpa interaksi langsung ini bertindak sebagai mekanisme pengujian mandiri yang objektif dan bebas intervensi, memastikan bahwa evaluasi terhadap kekayaan daerah dilakukan demi murni kepentingan publik. Dengan memetakan dan memverifikasi data mutasi, nilai perolehan, hingga penyusutan aset secara mendetail, penelitian ini secara presisi mampu mengendus potensi hilangnya nilai manfaat aset publik seperti penurunan kelayakan bus

sekolah, jalan raya, atau sistem drainase yang sering kali luput dari pengawasan administratif harian. Pada akhirnya, komparasi ketat terhadap kriteria PSAP 07 ini berdampak langsung pada jaminan keselamatan anggaran warga Kota Tangerang, memastikan bahwa sistem informasi tidak sekadar menampilkan angka-angka formal, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi riil fasilitas kota yang siap mengamankan hak harian warga atas pelayanan publik yang prima dan berkesinambungan. (Nur Fitriana Wati, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi sistem informasi aset oleh Pemerintah Kota Tangerang memberikan kontribusi yang sangat krusial dalam menjamin keandalan pengakuan serta pengukuran aset tetap. Berdasarkan hasil analisis dokumen laporan keuangan tahun 2024, sistem tersebut telah berhasil mengotomatisasikan mekanisme kapitalisasi biaya perolehan dan pengalkulasian akumulasi penyusutan secara tepat, sesuai dengan estimasi masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Walikota. Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada kemampuannya dalam menekan risiko kekeliruan manusia (*human error*) saat menetapkan nilai buku aset secara seketika (*real-time*). Penerapan teknologi ini memastikan proses pengakuan aset tetap berjalan tepat waktu seiring dengan beralihnya hak kepemilikan, serta menjamin pengukuran nilai didasarkan pada harga perolehan yang valid, yang pada akhirnya memperkuat akurasi data pos aset tidak lancar di dalam lembar Neraca daerah. (Laporan Keuangan Kota Tangerang, 2024)

Berkenaan dengan keselarasan pelaporan keuangan, hasil telaah mendalam terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengindikasikan bahwa aspek penyajian dan pengungkapan aset tetap secara

umum telah memenuhi kriteria yang digariskan dalam PSAP 07. Dokumen tersebut telah memetakan klasifikasi aset tetap mulai dari pos tanah, peralatan dan mesin, hingga konstruksi dalam pengerjaan (KDP) secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, pengungkapan di dalam CaLK telah memuat elemen informasi krusial, seperti basis kebijakan akuntansi penyusutan serta tabel rekonsiliasi nilai buku pada awal dan akhir periode. Pemanfaatan sistem informasi ini terbukti mempermudah penyusunan matriks mutasi aset yang rumit, sehingga setiap pergerakan data baik penambahan dari hasil pengadaan maupun pengurangan akibat penghapusan dapat ditelusuri dengan valid. Hal tersebut sekaligus memenuhi persyaratan fundamental dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Suhayati, 2021)

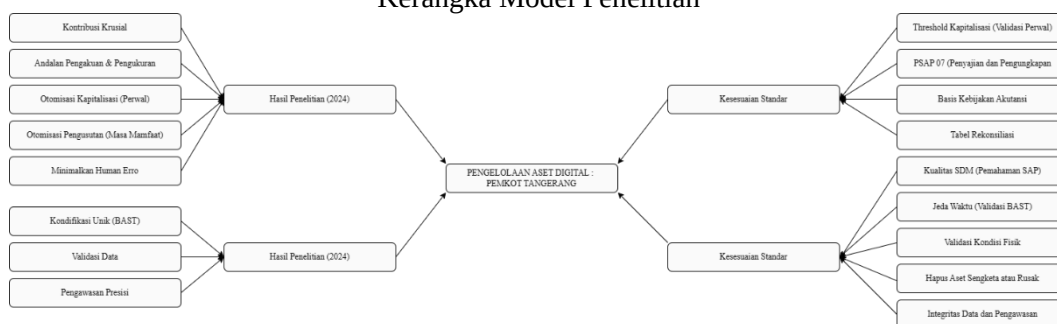
Kendati sistem informasi telah memberikan kontribusi besar, analisis mengenai hambatan yang ada tetap menjadi poin krusial dalam studi ini.

Berdasarkan penelaahan data sekunder, ditemukan bahwa validitas laporan keuangan secara mutlak masih bergantung pada kualitas data awal yang dimasukkan ke dalam basis data aset. Tantangan muncul saat terjadi disparitas antara pencatatan administratif pada sistem dengan kondisi fisik riil di lapangan, yang umumnya dipicu oleh keterlambatan sinkronisasi data lintas unit kerja.

Di samping itu, kerumitan dalam mengungkapkan aset-aset yang berstatus sengketa hukum atau mengalami kerusakan berat masih menuntut proses verifikasi manual yang mendalam agar tidak menimbulkan bias informasi bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas sistem informasi dalam mendongkrak akurasi pelaporan di Kota Tangerang baru akan mencapai titik optimal jika disokong oleh integrasi basis data yang lebih solid serta agenda pengawasan fisik secara berkala, sebagaimana yang diamanatkan dalam standar SAP. (Kolinug et al., 2015)

KERANGKA MODEL

Gambar 1.
Kerangka Model Penelitian



1. Praktik Manajemen Aset di Kota Tangerang

Integrasi dokumen valid seperti BAST dan penerbitan kodifikasi barang yang unik sejak fase awal pengadaan ini membawa dampak sosial yang mendalam, karena ketertiban administratif di hulu adalah perisai utama dalam melindungi hak milik publik di hilir.

Ketika setiap aset baru baik berupa lahan puskesmas, unit komputer sekolah, hingga komponen jaringan internet kota langsung terkunci dalam sistem digital yang presisi, ruang bagi potensi penyelewengan, "aset siluman", atau hilangnya barang publik akibat kelalaian pencatatan dapat ditutup sepenuhnya. Pada akhirnya,

kepastian data sejak awal perolehan ini berdampak nyata pada jaminan hak warga kota, memastikan bahwa setiap rupiah belanja modal yang bersumber dari pajak masyarakat benar-benar menjelma menjadi fasilitas pelayanan publik yang nyata, aman secara hukum, dan siap digunakan untuk menopang produktivitas harian masyarakat Kota Tangerang.

Kemampuan sistem dalam memetakan distribusi dan memperbarui data kondisi fisik aset secara berkala membawa dampak nyata yang langsung menyentuh keselamatan dan kenyamanan hidup harian warga Kota Tangerang. Ketika data mengenai aset yang "rusak ringan" atau "rusak berat" dapat diperbarui secara *real-time*, pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dan responsif untuk melakukan perbaikan sebelum fasilitas tersebut membahayakan publik seperti mengidentifikasi ruang kelas yang bocor, memperbaiki armada ambulans yang terkendala teknis, hingga membenahi lampu penerangan jalan yang padam. Pada akhirnya, kapitalisasi nilai pemeliharaan yang akurat sesuai SAP ini memastikan bahwa anggaran pemeliharaan daerah benar-benar dialokasikan secara adil dan tepat sasaran, sehingga hak masyarakat untuk menikmati fasilitas publik yang prima, aman, dan berkesinambungan dapat terus terpenuhi secara optimal. Ketegasan sistem dalam mengawal fase penghapusan dan mengeliminasi risiko *missing assets* ini memiliki dampak sosial yang sangat krusial, karena hilangnya aset secara administratif sering kali menjadi pintu masuk bagi kerugian materi yang membebani masyarakat. Ketika aset yang sudah tidak memiliki kemanfaatan ekonomi atau rusak total diverifikasi dan dikeluarkan dari Neraca secara transparan, pemerintah daerah

berhasil memotong rantai "biaya hantu" seperti anggaran pemeliharaan fiktif untuk barang yang sebenarnya sudah tidak ada, yang seharusnya bisa dialihkan untuk menyubsidi sektor pendidikan atau kesehatan warga. Pada akhirnya, pembersihan akun Neraca dari aset yang tidak lagi produktif ini berdampak nyata pada pemulihan ruang fiskal daerah, memastikan bahwa sisa kekayaan daerah yang tercatat benar-benar mencerminkan modal riil yang siap dioptimalkan demi mendanai program-program pembangunan baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan mutu kehidupan harian masyarakat Kota Tangerang.

2. Analisis Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan otomatisasi sistem yang presisi dalam menyaring ambang batas kapitalisasi ini membawa dampak nyata yang langsung menyentuh keadilan alokasi anggaran bagi pelayanan warga Kota Tangerang. Dengan adanya sistem yang secara instan memisahkan antara aset tetap di Neraca dan beban ekstrakomptabel seperti membedakan pengadaan komputer utama puskesmas dengan pembelian alat tulis kantor minor pemerintah daerah terhindar dari pemborosan energi administratif dalam mengawasi barang-barang kecil, sehingga dapat sepenuhnya fokus merawat aset-aset besar yang vital. Pada akhirnya, eliminasi risiko salah klasifikasi ini berdampak langsung pada kepastian bahwa dana publik tidak terserap untuk urusan birokrasi yang tidak produktif, melainkan dikelola secara efisien untuk memastikan setiap fasilitas pelayanan publik yang menopang kehidupan harian masyarakat selalu berada dalam kondisi siap pakai, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya kepada seluruh warga kota.

Pembaruan akumulasi penyusutan secara periodik dan otomatis tanpa intervensi manual ini membawa dampak sosial yang krusial, karena keandalan nilai neto aset di atas kertas mencerminkan kesiapan pelayanan publik yang nyata di lapangan. Ketika nilai penyusutan gedung, ambulans, hingga sistem drainase terhitung secara akurat setiap bulan menggunakan metode garis lurus yang valid, pemerintah daerah dapat mengantisipasi penurunan fungsi fasilitas tersebut sejak dini sebelum berubah menjadi kerusakan total yang melumpuhkan aktivitas warga. Informasi nilai buku yang andal ini berdampak langsung pada ketepatan waktu peremajaan aset-aset vital, memastikan masyarakat Kota Tangerang terhindar dari risiko kecelakaan atau hambatan layanan akibat infrastruktur yang usang. Pada akhirnya, pemenuhan asas relevansi dan keandalan sesuai PSAP 07 ini menjadi jaminan bahwa keuangan daerah dikelola dengan prinsip kehati-hatian, mencegah pemborosan anggaran darurat, dan memastikan hak harian warga atas fasilitas kota yang aman dan layak tetap terpenuhi secara berkesinambungan.

3. Tantangan Pengelolaan Aset Tetap
Kesenjangan kompetensi SDM teknis yang memicu kekeliruan kodifikasi dan klasifikasi pos aset ini membawa dampak sosial yang nyata, karena kesalahan ketik atau salah input di tingkat hulu birokrasi dapat berujung pada lumpuhnya pelayanan publik di tingkat hilir. Ketika seorang staf di unit kerja salah mengodifikasi bantuan alat kesehatan untuk puskesmas atau fasilitas komputer untuk sekolah, aset-aset vital tersebut berisiko "terpaku" di gudang secara

administratif, tidak bisa didistribusikan, atau terlambat dioperasikan karena status hukum dan anggarannya membingungkan di dalam sistem. Akibatnya, warga Kota Tangerang yang paling dirugikan mulai dari pasien yang tertunda mendapatkan penanganan medis yang layak hingga siswa yang kehilangan kesempatan belajar dengan fasilitas digital yang memadai. Oleh karena itu, program pelatihan sistematis bagi para operator bukan sekadar kebutuhan teknis organisasi, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan untuk memastikan bahwa kecanggihan teknologi benar-benar selaras dengan kecepatan dan ketepatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di lapangan.

Dampak sosial dari adanya time lag administrasi dan diskrepansi data ini sangat dirasakan oleh masyarakat, karena jeda waktu pembaruan sistem sering kali diterjemahkan sebagai penundaan pelayanan publik yang nyata di lapangan. Ketika fungsi keuangan telah mencatat realisasi belanja modal namun fungsi pengelolaan aset terlambat menerima dokumen BAST, fasilitas publik yang sudah selesai dibangun seperti puskesmas pembantu, ruang kelas baru, atau perbaikan jalan lingkungan menjadi menggantung status operasionalnya dan tidak boleh digunakan sebelum tercatat secara sah di sistem aset. Akibatnya, warga Kota Tangerang terpaksa menunggu lebih lama untuk menikmati hak fasilitas yang sebenarnya sudah dibiayai oleh uang pajak mereka sendiri, menunjukkan bahwa keterlambatan selebar dokumen administratif di meja birokrasi berdampak langsung pada terhambatnya peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup harian masyarakat.

Ketidaksempurnaan dokumen legalitas tanah dan adanya duplikasi data aset spesifik dalam basis data

ini membawa dampak sosial yang sangat sensitif, karena ketidakpastian hukum atas aset daerah dapat memicu konflik agraria dan mengancam hak ruang publik bagi masyarakat. Ketika sebidang tanah sekolah, puskesmas, atau taman kota belum tervalidasi aspek hukumnya lintas instansi, aset tersebut sangat rentan terhadap gugatan pihak ketiga atau sengketa lahan yang dapat berujung pada penyegelan fasilitas vital dan penghentian layanan publik secara mendadak. Hambatan administratif ini berdampak langsung pada rasa aman warga Kota Tangerang, di mana anak-anak terancam kehilangan tempat belajar atau pasien kehilangan tempat berobat akibat kelalaian sertifikasi. Oleh karena itu, pelaksanaan rekonsiliasi data yang menyeluruh demi menjaga opini audit bukan sekadar upaya mempertahankan prestasi administratif di atas kertas, melainkan sebuah langkah krusial untuk membentengi kekayaan komunal warga kota, memastikan kepemilikan daerah yang sah mutlak secara hukum, dan menjamin bahwa fasilitas yang berdiri di atasnya tetap aman digunakan untuk melayani generasi hari ini hingga masa depan.

KESIMPULAN

Keberhasilan otomasi sistem dalam menekan *human error* dan menyelaraskan penatausahaan BMD dari hulu ke hilir ini membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika proses pengadaan, pemantauan kondisi fisik, hingga kalkulasi penyusutan fasilitas publik berjalan secara presisi dan otomatis, pemerintah daerah secara langsung telah mengamankan hak-hak publik dari risiko salah urus anggaran yang sering kali berujung pada telantarnya sarana vital kota. Validasi kodifikasi unik dan ketepatan nilai kapitalisasi ini memastikan bahwa setiap

fasilitas pelayanan publik mulai dari puskesmas, gedung sekolah, hingga infrastruktur jalan dan drainase selalu berada dalam radar pengawasan yang akurat, terawat tepat waktu, dan siap digunakan. Pada akhirnya, transformasi digital yang sukses ini tidak sekadar menghasilkan laporan keuangan yang patuh pada PSAP 07, melainkan menjadi fondasi utama dalam memuliakan uang rakyat, menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas kota, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat bahwa Pemerintah Kota Tangerang mengelola aset daerah dengan transparansi dan tanggung jawab penuh.

Keberhasilan otomasi sistem dalam menekan *human error* dan menyelaraskan penatausahaan BMD dari hulu ke hilir ini membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika proses pengadaan, pemantauan kondisi fisik, hingga kalkulasi penyusutan fasilitas publik berjalan secara presisi dan otomatis, pemerintah daerah secara langsung telah mengamankan hak-hak publik dari risiko salah urus anggaran yang sering kali berujung pada telantarnya sarana vital kota. Validasi kodifikasi unik dan ketepatan nilai kapitalisasi ini memastikan bahwa setiap fasilitas pelayanan publik mulai dari puskesmas, gedung sekolah, hingga infrastruktur jalan dan drainase selalu berada dalam radar pengawasan yang akurat, terawat tepat waktu, dan siap digunakan. Pada akhirnya, transformasi digital yang sukses ini tidak sekadar menghasilkan laporan keuangan yang patuh pada PSAP 07, melainkan menjadi fondasi utama dalam memuliakan uang rakyat, menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas kota, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat bahwa Pemerintah Kota Tangerang mengelola aset daerah dengan transparansi dan tanggung jawab penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., & Syukron Mubarak, A. (2025). *Implementasi PSAP no. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Pencatatan Aset Sarana dan Prasarana Perumahan*.
- Febriana, D., & Nawawi, A. (2024). Febriana, Dina. 2023. Review of Calculation and Reporting of Depreciation of Fixed Assets Using PSAP 07 at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency in 2021. *Maret*, 2024(5), 195–217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521416>
- Firsta Haditswara. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai Psap 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit*.
- Khafiyya, N. A., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (1945). *Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Khafiyya, N. A., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2016). *Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis pengelolaan aset tetap.... In *Jurnal EMBA* (Vol. 818, Number 1).
- Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan. (2024). *CALK 2024*.
- Laporan Keuangan Kota Tangerang. (2024). *Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Audited)*.
- Mukaromah, L., Perusahaan, A. K., Sambas, P. N., Akuntansi, M., & Perusahaan, K. (2024). Menyibak Penerapan PSAP 07 Aset Bersejarah terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Mueum Daerah Kabupaten Sambas) *Uncovering the Application of PSAP 07 Historical Assets to the Presentation of Financial Statement (Study on Sambas Regency Regional Museum)* Eliza Noviriani EE Zurmansyah. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 4(2), 42–52.
- Nur Fitriana Wati. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*.
- Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, D., Mahmud Lasene, M., Munayang, O. H., Zuhroh, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., Abdul Azis Lamadjido, U., Penelitian, A., & Kunci, K. (2026). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1483–1490. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10332>
- Pongsibidang, A. R., & Nugroho, P. I. (2023). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 2(1), 48–65. <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i1.13249>

- Suharsono, J., Uswatun Hasanah, I., Hery Koeshardjono, R., Andrianata, M., & Novan Fithrianto, M. (2024). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PP 71/2010 dan PSAP 07 pada Pemerintah Kota Probolinggo.*
- Suhayati, M. B. H. (2021). *Pengelolaan Aset (Psap 07 Aset Tetap) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*
- Yevi Dwitayanti, H. Z. M. P. P. 07 A. B. terhadap P. L. K. (Studi pada M. D. K. S. (2024). *Tinjauan_Perlakuan_Akuntansi _Aset_Tetap. Indonesian Accounting Literacy Journal (Vol. 4, No. 2).*